

Azhar Muhamad Akbar

TAAT PADA AGAMA, SETIA PADA NEGARA

Bagaimana Islam Berbicara Tentang Negara?



“Meyakini agama yang kita anut itu perlu untuk menghiasi kepribadian yang baik, mulia dan menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan. Titik kemanusiaan inilah berkorelasi dengan cita-cita berbangsa sebagai masyarakat madani untuk setia pada negara-bangsa. Buku ini penting sebagai titik temu pemikiran kita terhadap dua kondisi yang kerap dipertentangkan.”

-Dirga Maulana, Peneliti PPIM UIN Jakarta



別冊



TAAT PADA AGAMA, SETIA PADA NEGARA

*Bagaimana Islam Berbicara
Tentang Negara?*

Azhar Muhammad Akbar

TAAT PADA AGAMA, SETIA PADA NEGARA

Bagaimana Islam Berbicara tentang Negara?

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Penulis: **Azhar Muhamad Akbar**

Penyunting: **Dienni Ruhjatini Sholihah**

Penyelaras Aksara: **Johan Aristya Lesmana**

Penata Aksara dan Sampul: **Dono Merdiko, Luqman El-Hadi**

Tim Pelaksana:

Muhammad Ammar Wibowo

Mutiara Citra Mahmuda

Juli Jurnal

Diterbitkan oleh

YAYASAN ISLAM CINTA INDONESIA

Plaza Cirendeu Lt. 2

Jl. Cirendeu Raya No. 20 Pisangan, Ciputat

Tangerang Selatan 15419

Telp. 021-7419192

E-mail: infogerakanislamcinta@gmail.com



#gerakanislamcinta

ISBN: 978-602-53014-5-2

Cetakan Pertama, September 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayo ikut sebarkan pesan
cinta dan damai Islam. Gabung dengan
Gerakan Islam Cinta (GIC).

GIC terbuka bagi siapapun yang percaya
bahwa Islam adalah agama cinta,
damai, dan welas asih.

Info selengkapnya
www.islamcinta.co

Isi Buku

Mukadimah - ix

Bernegara dalam Islam - 1

Bernegara Ala Rasulullah - 37

Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Bernegara - 51

Umar Bin Khaththab Negarawan Tegas Tidak

Beringas - 63

Usman Bin Affan dalam Bernegara - 75

Pemilu Zaman Ali Bin Abi Thalib - 83

Kerajaan Islam - 89

Negara Islam Zaman Now -105

Bernegara Gak Usah Kaku, Selow Aja! -123

Cinta Tanah Air Cerminan Iman -131

Kepustakaan -151

Tentang Penulis -154



Mukadimah

Ketaatan dan kesetiaan merupakan dua kata yang berbeda saat diucapkan, namun memiliki kesamaan makna substansial. Dua-duanya (ketaatan dan kesetiaan) mencerminkan cinta yang disertai pengabdian.

Cerminan cinta yang disertai pengabdian itu perilakunya mirip sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara, lho. Sang pecinta akan selalu menundukkan ego untuk menuruti apa yang diminta kekasihnya dengan ketaatan dan kesetiaan yang *fuel injection* (kok, mirip motor kekinian ya, hehehe).

Tak heran, bila disuruh berlari mengelilingi Monas, energinya akan keluar super *gede*, sehingga lelah pun tak dirasa, berat terasa ringan, kunang-kunang menjadi terang, dan kaki pun seolah mewakili kaki Lionel Messi: Lincih bingitss!

Kenapa, kok bisa seperti itu?



Ya, karena ia memiliki ketaatan dan kesetiaan sehingga penghambaan atau pengabdian itu dilakukan berdasarkan cinta. Ingat, bro and sis, ketaatatan akan menjadi hampa tanpa adanya kesetiaan. Karena Ketaatan dan Kesetiaan hadirnya tak dapat dipisah, menyatu layaknya nyawa dalam raga kita.

lalu, dalam konteks keberislaman dan keber-negaraan, siapakah yang harus kita taati? Dan kepada siapa kesetiaan tersebut diberikan?

Di dalam al-Quran, Allah Swt berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan Ulii Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

QS Al-Nisa [4]: 59

Ayat tersebut, *ngasih* pesan *buat* hidup kita, termasuk dalam hal bernegara dan berbangsa. Kita kudu taat kepada Allah, Rasulullah Saw, dan *Ulil Amri*.

- Taat pada Allah, berarti kita sukarela ngejalanin perintah dan menjauhi larangan-Nya, baik yang diinformasikan al-Quran maupun al-Hadis.
- Taat pada Rasulullah, artinya ialah ngejadiin beliau teladan dalam kehidupan kita, seperti yang terkandung di dalam sunnahnya.
- Taat pada *Ulil Amri* atau pemerintah, artinya kita mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati oleh pemerintahan, yang ditemukan dalam sebuah negara.

Allah, Rasulullah Saw, dan *Ulil Amri*, jika disederhanakan lagi bisa dikategorisasi menjadi dua bahasan yang berbeda. Agama dan negara, yakni Allah dan Rasul-Nya itu agama, sementara *Ulil Amri* itu negara.



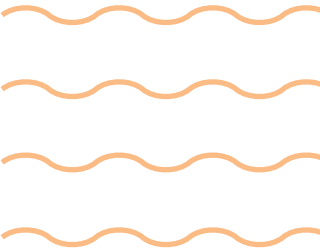
Jadi sesungguhnya, melalui firman-Nya ini, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada agama, dan setia kepada negara. Dengan kata lain, Allah menyuruh kita untuk mengabdikan diri kepada Illahi, dan mencintai Ibu Pertiwi.

Buku ini ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar konsep negara di dalam Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang negara, keragaman gaya kepemimpinan dalam Islam, keragaman sistem negara, sistem hukum, dan bagaimana menjadi negarawan yang baik.

INI ADALAH KEBUTUHAN KITA, TERUTAMA
MASYARAKAT INDONESIA. MASYARAKAT YANG HIDUP
DI NEGARA PENUH WARNA—WARNI SUKU, AGAMA,
KEYAKINAN, BUDAYA, BAHKAN IDEOLOGI.

KETAATAN KEPADA ALLAH PERLU DIJAGA, KARENA
DENGANNYA AKAN MELAHIRKAN KESALEHAN.
NEGARA HANCUR BUKAN KARENA BANYAKNYA
ORANG JAHAT, AKAN TETAPI KARENA BANYAK
BANGET ORANG SALEH YANG DIAM TAK MENCEGAH
KEJAHATAN YANG BEREDAR DI SEKITAR.

WASPADA...WASPADA... SEPERTI DIBILANG BANG
NAPI!



SELAIN ITU, KESETIAAN KEPADA NEGARA JUGA PERLU DIPERTAHANKAN DAN DIPELIHARA KARENA KESETIAAN MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD CINTA, DAN KAMU JUGA TAHU, BAHWA CINTA AKAN MEMUNCULKAN KASIH—SAYANG, KEMUDIAN BERUBAH KEMBALI MELAHIRKAN KETENANGAN, KETENTRAMAN DAN KEDAMAIAN.

KISRUHNYA PERSOALAN DI INDONESIA, BUKAN KARENA BANYAKNYA ORANG RADIKAL, AKAN TETAPI KARENA BANYAKNYA ORANG DAMAI YANG DIAM SERIBU BAHASA SAAT RADIKALISME MENYEBAR.

OLEH SEBAB ITU, KESETIAAN KEPADA NEGARA DAPAT DIJADIKAN BAROMETER UNTUK MENGUKUR SEJAUH MANA KEIMANAN DAN KETAATAN KITA KEPADA ALLAH. SEMAKIN KITA SETIA KEPADA NEGARA, MAKA SEMAKIN TAAT PULA KITA KEPADA ALLAH.

Mengapa demikian?

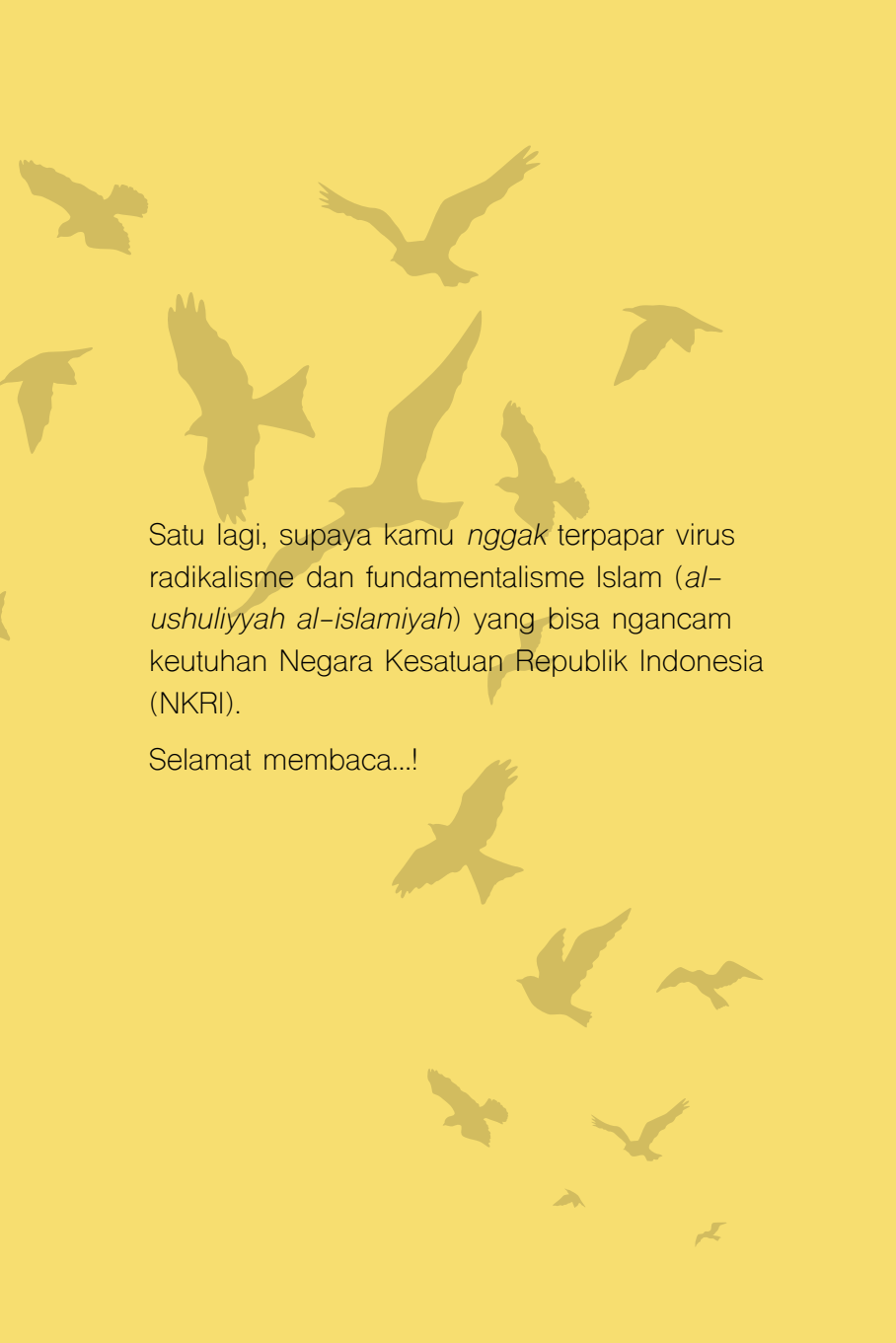
Karena secara tegas Allah Swt dan Rasul-Nya yang memerintahkan kita untuk setia kepada negara dan wujud daripada kesetiaan itu ialah menjadikan Indonesia sebagai negara penuh kedamaian (*Daar as-salam*).

Jangan heran *dong*, kalau saya bikin buku berjudul:

TAAT PADA AGAMA SETIA PADA NEGARA

Bagaimana Islam Berbicara Tentang Negara?

Maksudnya, supaya kamu semakin taat pada Allah dan mencintai negara Indonesia dipenuhi laku transformatif sehingga *kedorong* buat mencipta kedamaian, keamanan, dan ketentraman.



Satu lagi, supaya kamu *nggak* terpapar virus radikalisme dan fundamentalisme Islam (*al-ushuliyyah al-islamiyah*) yang bisa ngancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selamat membaca...!



BERNEGARA DALAM ISLAM

*Agama yang Menjunjung Tinggi
Nilai-nilai Luhur dalam Bernegara*



Kita harus yakin *dong*, bahwa intisari ajaran Islam adalah *Rahim* (cinta kasih). Ajaran cinta ini mampu melahirkan, menghidupkan, dan mengembangkan peradaban umat manusia ke arah yang berkemajuan, layaknya rahim seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan menghidupi janin.

Prof. Nasaruddin Umar¹ mengatakan bahwa secara literal *rahim* itu berasal dari akar kata “rahima” yang berarti mengasihi. Dari kata *rahim* muncul *rahmah* yang berarti penuh kasih, lalu ada kata *ar-rahim*, yang dijadikan sebagai salah satu *asma’ulhusna* yang berarti cinta kasih.

1. Nasaruddin Umar, *Tasawuf Modern: Jalan Mengenal dan Mendekatkan Diri pada Allah*, Republika, Jakarta, 2015. Hlm. 154-155.

Nah, karena intisari Islam itu *ar-rahim* (cinta kasih), makanya kamu wajib alias harus menjadikan cinta sebagai landasan dalam semua aktivitas, termasuk dalam bernegara. Karena secara hakikat Islam itu diturunkan ke muka bumi untuk menciptakan perdamaian, bukan malah sebagai pencipta kegaduhan sosial dan menebarkan ancaman (*teror*).

Perlu kamu ketahui, bahwa tidak ada yang namanya “Negara Islam” di dalam al-Quran, Hadis, dan sejarah sahabat.

Bassam Tibi, dalam buku *Islam dan Islamisme* (Mizan, 2016) membedakan pengertian Islam dan Islamisme ini. Sederhananya, Islam adalah ajaran iman; sementara Islamisme ialah politik yang diagamaisasikan sebagai interpretasi spesifik atas Islam, dan mereka menjadikan ajaran Islam sebagai ideologi politik.²

2. Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, Bandung, Mizan, 2016. Hlm. 1

Notabene, ya, kalangan Islamis ini berasal dari orang Islam yang memahami negara dan Agama tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam faham mereka mewujudkan “negara Islam” sebagai panggilan suci (jihad). Meminjam istilah Haidar Bagir, Islam seperti ini ialah “Islamnya manusia”, bukan “Islamnya Tuhan” karena merupakan hasil interpretasi terhadap ajaran Tuhan.

Tetapi, dengan tidak ada bentuk khusus negara seperti apa bentuk sistemnya, bukan berarti nilai-nilai Islam tidak dihidupkan dalam bernegara. Karena agama itu menghidupkan, bukan membunuh peradaban!

APABILA POLITIK DIPISAHKAN DARI AGAMA,
MAKA HILANGLAH MAKNANYA.
KITA MASIH MEMBUTUHKAN PULA CAHAYA
YANG TERUS BERSINAR (DALAM POLITIK —
PEN), YAKNI CAHAYA IMAN KEAGAMAAN.

— MAHATMA GANDHI — 3

Dalam bernegara⁴, kita bisa menghidupkan nilai-nilai Islam yang memegang teguh asas perdamaian, tanpa harus menciptakan apa yang disebut sebagai “Negara Islam”. Ada empat asas bernegara dalam Islam, tapi saya lupa lagi asas yang satunya lagi. Maklum sebagai manusia, saya tempatnya lupa dan salah – *al-insaanu mahallu al-khaththa wa nisan*.

PERTAMA, ASAS PERSAMAAN⁵

Dalam bahasa Arab disebut dengan *al-musawah*. Asas ini memiliki derajat manusia di hadapan sesama manusia itu sama posisinya. Tiada yang lebih tinggi dari siapa pun, termasuk bila dibandingkan dengan Presiden. *Hehehe* kita sama-sama diciptakan Allah. Sama-sama suka nasi putih, sama-sama bernafas, dan sama-sama beribadah hanya kepada-Nya. Asas persamaan ini kemudian diadopsi

4. Maksud bernegara ialah hidup dalam menjalani aktivitas kebangsaan, tanpa terjebak pada islamisme, yang menghendaki berdirinya negara Islam. Artinya, seorang Muslim dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan negara modern yang menggunakan sistem demokrasi lainnya, wajib mengabdikan diri membela negaranya secara *all out*.

5. Baca Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, Risalah Gusti, 2003. Hlm 305-306

bernegara menjadi aturan konstitusional untuk saling memandang setiap warga negara itu memiliki derajat sama, tanpa dibatasi oleh keturunan, ras, suku, agama, bahasa, dan status sosial.

Meskipun, berbeda-beda suku, agama, bahasa, keturunan, dan strata sosial, hal itu hanya sebatas dari rencana Allah untuk saling mengenal satu sama lain.

Yey kayak yang lagi ta'arufan deh hehehe



Allah Swt berfirman:

WAHAI MANUSIA!
SESUNGGUHNYA KAMI TELAH MENCIPTAKAN
KAMU DARI SEORANG LAKI—LAKI DAN
SEORANG PEREMPUAN,
DAN MENJADIKAN KAMU BERBANGSA—
BANGSA DAN BERSUKU—SUKU,
SUPAYA KAMU SALING KENAL—MENGENAL.
SESUNGGUHNYA ORANG YANG PALING MULIA
DI ANTARA KAMU DI SISI ALLAH
IALAH ORANG YANG PALING TAKWA DI
ANTARA KAMU. SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA
MENGETAHUI LAGI
MAHA MENGENAL.

QS AL—HUJURAT [49]: 13

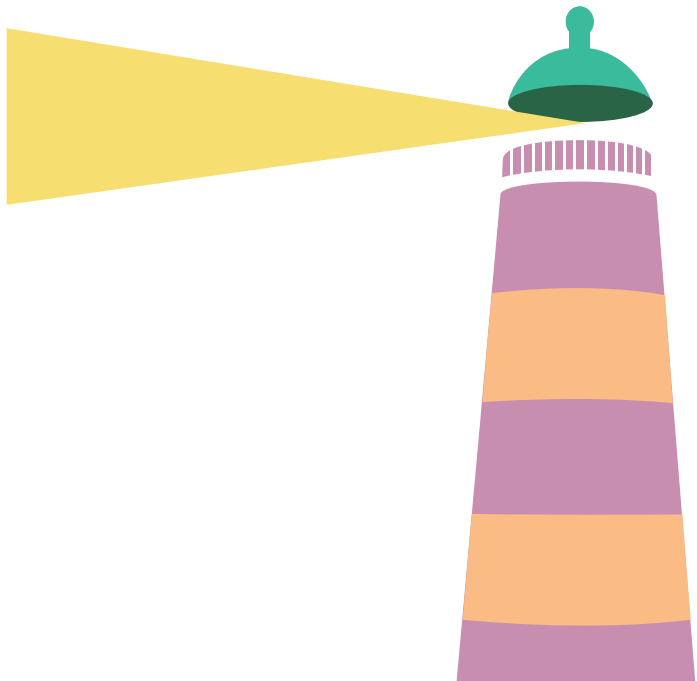
Asas persamaan (*al-musawah*) juga pernah diajarkan Rasulullah Saw semasa berada di kota Madinah. Beliau Saw menjamin kebebasan setiap penduduk Madinah untuk menganut agama masing-masing, sehingga penduduknya terdiri atas penganut agama Islam, Yahudi, dan Nasrani.

Pada waktu itu, kalangan minoritas tidak ditindas dan mayoritas pun tidak menindas. Setiap warga memiliki kebebasan yang sama sebagai wujud dari asas al-musawah ini.

Bukan hanya dalam hal kebebasan beragama, Rasulullah Saw pun mengajarkan pada kita untuk menjalankan asas persamaan ini dalam bidang akses hukum.

Saat di Madinah, Rasulullah Saw selalu memperlakukan siapa pun secara sama, tidak pernah membedakan hak dan kewajiban hukum. Ini bisa dibuktikan saat seorang perempuan dari suku Makhzum kepergok dan terbukti telah mencuri perhiasan orang lain.

Perempuan itu beserta para sahabat yang dekat dengan melakukan *lobbying* kepada Rasulullah Saw meminta keringan atau kelonggaran hukum. Namun, dengan tegas permintaan para sahabatnya itu ditolak mentah-mentah.



Dan ketika akan menjatuhkan hukuman kepada perempuan terhormat tersebut, Rasulullah Saw bersabda:

WAHAI MASYARAKAT !
BANGSA—BANGSA SEBELUM KITA
TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG BESAR.
JIKA ORANG—ORANG BESAR MENCURI,
MEREKA MEMBIARKANNYA.
SEMENTARA ITU,
APABILA PENCURIAN DILAKUKAN ORANG KECIL,
MEREKA MENEGAKKAN HUKUM
SETEGAS—TEGASNYA.
DEMI ALLAH !,
JIKA FATIMAH ANAK MUHAMMAD MENCURI,
AKU AKAN POTONG TANGANNYA

*(dalam kitab Shahih Muslim,
Hadis Riwayat Muslim).*





Begitulah asas *al-musawah* ini diajarkan. Nilai-nilai ajaran Islam akan selalu menghidupi kebernegaraan kita saat selalu dipegang teguh, sehingga bagi pejabat dan aparat, jabatan tidak bikin sewenang-wenang; kekuasaan tidak serta merta bikin semena-mena.

aat asas *al-musawah* ini dihidupkan, kita bisa belajar bahwa bernegara dalam Islam itu *nggak* boleh diskriminasi, sebab Rasulullah Saw juga tidak melakukan pembantaian, melainkan mewujudkan perdamaian.

KEDUA, ASAS KEADILAN⁶

Asas kedua yang harus kita hidupkan saat bernegara ialah asas keadilan. Di dalam bahasa Arab sama dengan *al-adalah* yang berarti profesional dan proporsional atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sederhananya, dalam konteks bernegara, kita harus menempatkan semua warga negara mendapatkan keadilan hukum, tanpa pandang bulu.

6. Nurcholish Madjid, *32 Khutbah Jumat Cak Nur*, Jakarta, Noura Books, 2016. Hlm 26-27

Berkaitan dengan asas keadilan ini,
Allah Swt berfirman:

SESUNGGUNYA ALLAH MENYURUHMU
MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA
YANG BERHAK MENERIMANYA, DAN
(MEMERINTAHKANMU) APABILA
MENETAPKAN HUKUM DI ANTARA
MANUSIA SUPAYA KAMU MENETAPKAN
DENGAN ADIL. SESUNGGUHNYA
ALLAH MEMBERI PENGAJARAN
YANG SEBAIK—BAIKNYA KEPADAMU.
SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA
MENDENGAR LAGI MAHA MELIHAT.

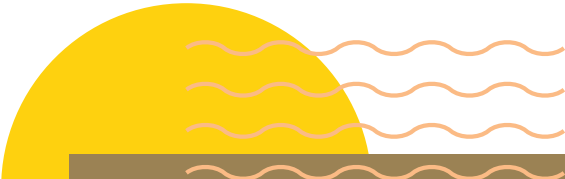
QS. An-Nisa: Ayat 58



Keadilan dalam bidang hukum ini sangat melekat pada pribadi Rasulullah Saw. Bukan hanya ketika sebagai nabi saja beliau memegang teguh asas al-adalah, namun juga ketika menjalankan fungsi kepemimpinan lainnya kepala negara pun beliau tidak pernah melepaskan jubah keadilan.

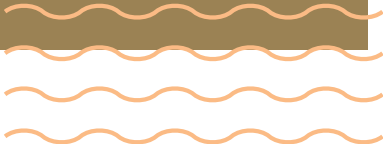
Suatu ketika, saat fathul Makkah, Rasulullah ingin menunaikan shalat dan memasuki Ka'bah. Namun mereka tidak bisa, karena Ka'bah terkunci dan ternyata kunci Ka'bah dipegang oleh Usman bin Talhah.⁷

7. Riwayat atau shirah dalam buku ini diambil dari sumber sejarah Rasulullah Saw yakni: 1. Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfuri, *Ketika Bulan Terbelah: Jejak Biografi Nabi Muhammad*, Alita Aksara Media, Jakarta, 2012. Hlm. 301-302; 2. Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Tintamas, Jakarta, 2016. Hlm 478; 3. Aidh Al-Qarni, *The Story of Message*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2008. Hlm. 358-359.



Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil kunci tersebut. Namun, Usman sempat bersitegang tidak mau memberikan kunci itu kepada Ali. Lalu, disambarlah kunci itu oleh Ali, dan terbukalah pintu Ka'bah.

Setelah pintu terbuka, Rasulullah Saw kemudian shalat dua rakaat. Pasca menunaikan shalat, Rasulullah Saw pun memerintahkan Ali untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Usman bin Talhah, seraya menyuruhnya untuk menyampaikan permintaan maaf kepadanya.



Rasulullah Saw tidak menyuruh untuk memberikan kunci Ka'bah kepada Usman, ialah pertanda bahwa jabatan pemegang kunci harus kepada orang yang professional. Padahal, waktu *Futuh Mekkah* itu, banyak dari kalangan orang-orang Islam yang sudah lebih dulu masuk Islam daripada Usman Bin Talhah.

Namun, bagi Rasulullah Saw itu sangatlah mungkin, bahkan harus dilakukan karena beliau tidak melihat awal keislaman seseorang dan tidak memandang senioritas. Rasulullah Saw hanya melihat aspek profesionalitas dan proporsionalitas dalam memberikan amanat.

Dan, saat peristiwa *Futuh Makkah* itu, bagi Rasulullah Saw hanya Usman lah yang mampu menjaga kunci Ka'bah itu dengan baik karena berpengalaman menjaganya selama bertahun-tahun.

Rasulullah dengan adil menyerahkan amanat itu kepada Usman Bin Talha. Rasulullah Saw tidak melihat siapa orangnya, keimanan dan keislamannya, setinggi apa jabatannya dan sekaya apa kekayaannya. Tapi, yang dilihat oleh Rasulullah Saw adalah pengalaman, keahlian dan kemampuannya dalam mengemban amanat.

Itulah cara Rasulullah menjunjung tinggi asas keadilan yang bisa kita praktikkan saat bernegara. Kita harus profesional dan proporsional memberikan tugas dan jabatan tanpa melihat latar belakang ideologi, keyakinan, dan keturunan.

Sehingga saat memberikan amanah pada seseorang, agama tidak jadi hambatan, suku tidak menjadi batu sandungan, dan status sosial tidak menjadi alasan untuk memperoleh kepercayaan.

Karena, Islam selain disebut sebagai agama cinta, juga merupakan agama keadilan khususnya di bidang hukum.

RASULULLAH SAW BERSABDA:
JIKA AMANAT TELAH DISIA—SIAKAN
TUNGGU SAJA KEHANCURAN
AKAN TERJADI.

LALU SEORANG SAHABAT BERTANYA,
BAGAIMANA MAKSUD AMANAT DISIA—
SIAKAN ITU WAHAI RASULULLAH?
NABI MUHAMMAD SAW MENJAWAB,
JIKA URUSAN DISERAHKAN BUKAN
KEPADA AHLINYA, MAKA TUNGGU SAJA
KEHANCURANNYA".

(dalam Kitab Shahih Bukhari, Hadis Riwayat Bukhari).

KETIGA, MUSYAWARAH ATAU SYURA⁸

Musyawarah artinya cara untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, yang dihasilkan dari keterbukaan menerima pendapat orang lain.

Dalam al-Quran, asas ini selalu dipegang teguh oleh orang-orang yang beriman ketika akan mengambil keputusan. Dalam praktik kepemimpinan, yang bisa kita hidupkan dalam bernegara, Rasulullah Saw pun selalu menjalankan aktivitas bermusyawarah.

Rasulullah Saw membentuk lembaga permusyawaratan, yang beken disebut *Majelis Syura* dengan merekrut empat belas orang sahabat sebagai anggotanya. Mereka terdiri dari sahabat yang berasal dari kaum Muhajirin (Mekkah) dan Anshar (Madinah). Majelis ini berfungsi untuk memutuskan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umat Islam.

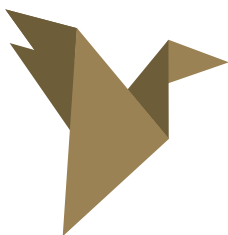
8. Baca Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, Risalah Gusti, 2003. Hlm 305-306.

Sistem musyawarah ini memberi pesan bahwa dalam menjalankan aktivitas bernegara, kita harus selalu mengacu pada keputusan-keputusan legislatif sebagai bukti bahwa Islam itu tidak otoriter.

Musyawarah ini juga merupakan bukti bahwa Rasulullah Saw tidak jemawa, tidak sok berkuasa, dan tidak merasa diri raja atau bos, tapi beliau seorang pemimpin sejati.

Rasulullah Saw menyadari bahwa dengan musyawarah akan lahir keputusan-keputusan yang holistik: menyentuh semua kalangan, mengakomodasi semua golongan, dan memfasilitasi semua pemeluk agama.

Artinya orang beriman selalu melibatkan kesepakatan orang lain ketika akan mengambil suatu keputusan. Tidak merasa diri paling benar, tidak tertutup, tidak rigid dan tidak egois. Orang beriman legowo terhadap perbedaan sehingga dengan cara musyawarah ini dapat membuka ruang kepada orang lain untuk berbicara, dan berpendapat.



Allah Swt berfirman:

MAKA KARENA RAHMAT DARI ALLAH—LAH,
KAMU BERLAKU LEMAH LEMBUT
TERHADAP MEREKA.

SEKIRANYA KAMU BERSIKAP KERAS LAGI BERHATI
KASAR, TENTULAH MEREKA MENJAUHKAN DIRI DARI
SEKELILINGMU.

KARENA ITU MAAFKANLAH MEREKA,
MOHONKANLAH AMPUN BAGI MEREKA,
DAN BERMUSYAWARAH LAH DENGAN MEREKA
DALAM URUSAN ITU.

KEMUDAIAN APABILA KAMU TELAH MEMBULATKAN
TEKAD, MAKA BERTAKWALAH KEPADA ALLAH.

SESUNGGUHNYA ALLAH
MENYUKAI ORANG—ORANG YANG BERTAWAKKAL
KEPADA—NYA.

QS Ali Imran [3]: 159



Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Dalam bernegara dan bermasyarakat, Allah mengajarkan kelembutan. Dan, salah satu kelembutan hati, kelegawaan jiwa, dan kebeningan jiwa ialah bisa dibuktikan saat bermusyawarah.

Dalam bernegara, Islam juga mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain. Dengan kata lain mendahulukan musyawarah.

Lagi-lagi ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Nabi sering bermusyawarah dengan para sahabat. Salah satunya mengambil keputusan ketika akan melakukan perjanjian *Hudaibiyah*.⁹

9. Riwayat atau shirah Nabi dalam buku ini diambil dari sumber sejarah Rasulullah Saw yakni: 1. Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfuri, *Ketika Bulan Terbelah: Jejak Biografi Nabi Muhammad*, Alita Aksara Media, Jakarta, 2012; 2. Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Tintamas, Jakarta, 2016; 3. Aidh Al-Qarni, *The Story of Message*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2008.

Beliau meminta pendapat kepada para sahabat. Abu Bakar Ra salah satunya yang memberikan masukan kepada Rasulullah Saw.

Dia berkata kepada Nabi: **"Wahai Rasulullah Saw, menurutku janganlah kita membereskan orang-orang Musyrik itu. Sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk melakukan Ibadah umrah".**

Apa yang terjadi?

Dengan terbuka Rasulullah Saw menyetujui pendapat Abu Bakar itu. Dan diambillah suatu keputusan untuk melakukan perjanjian *Hudaibiyah* dengan orang-orang Quraisy.



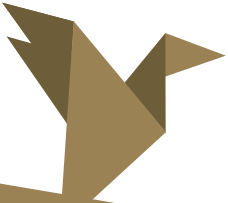
Itulah etika Rasulullah dalam bernegara. Beliau sedemikian terbuka dengan berbagai beda pandangan. Meskipun beliau adalah nabi, tidak lantas bersikap otoriter, keras dan tidak mendengarkan pendapat orang lain.

Bahkan bukan hanya dengan orang-orang Muslim, dengan non-Muslim pun Rasulullah Saw sering melakukan musyawarah. Salah satunya, beliau pernah melakukan musyawarah dengan orang Yahudi di Madinah.

Rasulullah berhasil bermusyawarah dengan orang Yahudi yang menghasilkan kesepakatan berisi tentang perjanjian persahabatan dan persekutuan antara Rasulullah dengan orang Yahudi.

Rasulullah dengan orang-orang Yahudi berkomitmen, untuk sama-sama saling menghargai, melindungi, dan mengakui kebebasan memeluk agama.

Sungguh luar biasa akhlak dan etika Nabi dalam bernegara. Bukan konsep dan gagasan belaka, tapi terpancar dalam perilakunya juga. Itulah etika yang diajarkan Rasulullah dan orang-orang beriman dalam bernegara.



Tak peduli dengan latar belakangnya.
Muslim maupun bukan, kaya atau miskin,
pejabat ataupun rakyat; selama pandangan
itu baik, maka pendapat orang itu akan
diambilnya.

Rasulullah membuka mata, telinga, pikiran
dan hati untuk menerima kebaikan. Untuk
menyambut kebenaran, dari mana pun
sumber dan asalnya.

Maka pantas jika sahabat Ali bin Abi Thalib r.a pernah berkata.

"PANDANGLAH APA YANG
DIKATAKAN ORANG.
DAN JANGANLAH KAMU
MEMANDANG ORANG YANG
MENGATAKANNYA."

Jadi, *bro and sis*, Islam itu *rahmah*, bukan marah, *ya*. Islam mengajarkan untuk selalu memaafkan perbedaan yang terjadi dalam wujud musyawarah.

Itulah tiga asas bernegara dalam Islam, yang dapat saya sampaikan kepada *bro and sis*. Kalau ada kekurangan, aku mohon maaf dan minta masukannya...*ya*.

Akhirul kalam, bernegara itu cukup dengan mengamalkan **1. Asas al-musawwah**, **2. Asas al-adalah**, **3. Asas al-musyawah**.



BERNEGARA ALA RASULULLAH

*Praktik Ketatanegaraan
Zaman Rasulullah Saw*

Allah Yang Mahacinta dan Mahakasih menciptakan serta mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul-Nya dengan penuh cinta. Dia (Allah) menganugerahkan kemuliaan pribadi, kesucian niat, dan akhlak penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Tak heran bila baginda Saw disebut sebagai Nabi cinta.

Nabi Muhammad Saw, mencintai seluruh yang ada di bumi sebagaimana Allah juga mencintainya. Beliau Saw menempatkan manusia sebagai ibunya, sanak familinya, anak perempuannya, saudara saudaranya, ayahnya, dan anak laki-laknya. Dalam bahasa lain, manusia dalam kehidupan Nabi Saw ialah kekasihnya yang harus diperlakukan penuh kasih.¹⁰

10. Muhammad Majdi Marjan, *Muhammad Nabi Cinta*, Pustaka IMan, Depok, 2006. Hlm 69-72

Perlakuan penuh kasih Rasulullah Saw juga dipraktikkannya dalam aktivitas – dalam konteks modern – bernegara. Karena baginda Saw mendapatkan dua amanat langsung dari Allah, yakni menjalankan misi keagamaan dan kenegaraan.

Jadi, *bro and sis*, pantas apabila kita sebut bahwa Rasulullah Saw itu seorang negarawan *the best forever*. Sebab, banyak banget teladan beliau yang bisa kita amalkan dalam bernegara.





RASULULLAH SAW ITU
SEORANG PEMIMPIN
TOLERAN.

Sikap toleran beliau di Madinah, menciptakan kondisi aman, tentram, tenang, dan damai sehingga semua kalangan – baik Muslim, Non Muslim, Muhajirin, Anshar, dan kelompok-kelompok yang ada di Madinah pada waktu itu merasa aman kehidupannya.

Hal itu dibuktikan dengan diabadikannya sebuah piagam, sebagai perjanjian Hak Asasi Manusia pertama di dunia oleh akademisi, yang dikenal sebagai Piagam Madinah.

Keren, bukan?

Piagam Madinah mengandung prinsip-prinsip kenegaraan. Yakni prinsip kebebasan beragama, menjaga hubungan antar kelompok, dan kewajiban bela negara. Prinsip-prinsip itu ditampilkan Rasulullah dalam kehidupan bernegara.



PERTAMA, PRINSIP KEBEBASAN

Prinsip kebebasan yang terkandung di dalam piagam Madinah bukan hanya perjanjian tekstual nihil aksi. Rasulullah Saw dalam tindak kesehariannya selalu membebaskan warganya dalam berkeyakinan dan bertuhan. Beliau tidak pernah memaksa, sehingga nampaklah hakikat Islam sebagai agama cinta.

Rasulullah Saw pemimpin yang terbuka, inklusif, dan toleran saat berhadapan dengan perbedaan. Beliau juga menerima kritik dan saran dari siapa pun tanpa harus marah-marah.

Bahkan, semasa memimpin umat dan kota Madinah, Rasulullah Saw beberapa kali menerima kritik dari sahabatnya Umar Ibn Khatthab. Bahkan, kritik tersebut juga tak jarang didapatkannya dari rakyat cacah biasa.



Suatu ketika, saat berjalan-jalan di sebuah kebun di kota Madinah, beliau Saw bertemu dengan seorang petani kurma. Petani itu, terlihat sibuk sedang mengawinkan benih kurma. Rasulullah, yang memergokinya, meminta kepada petani tersebut agar benih kurma tidak dikawinkan, tapi biarkanlah tumbuh secara alami.

Petani itu merasa saran Rasulullah Saw itu kurang tepat. Namun, karena diliputi rasa penghormatan mendalam, akhirnya petani itu menuruti permintaannya.

Tibalah waktu panen. Petani itu memanen kurma yang dibiarkan tumbuh secara alami. Dan, ternyata hasil panen kurma menurun drastis. Lalu petani itu melaporkan hasilnya kepada Rasulullah Saw.

Melihat hasil panen yang menurun drastis itu, Rasulullah Saw pun menyadari keterbatasan pengetahuannya di bidang pertanian *khususon* tentang menanam kurma, lalu berujar: “***Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu.***” (dalam Kitab *Bulughul Maram*, Hadis Riwayat Ath-Thabrani).

Hadis tersebut menggambarkan keterbukaan Rasulullah Saw. Meskipun dirinya nabi dan mempunyai jabatan tinggi, ia tetap terbuka. Memberi kesempatan berpikir, berkarya, dan berpendapat kepada warganya sekalipun berasal dari warga biasa.

KEDUA, PRINSIP KERUKUNAN

Dalam hal kerukunan, Rasulullah Saw adalah pemimpin yang diliputi kesentosaan jiwa dalam menyikapi keragaman. Nabi Saw selalu berinteraksi dan bersahabat dengan penganut agama apapun, dengan Yahudi sekalipun. Baginya Agama bukanlah sekat; melainkan jembatan untuk menuju surga.

Semua agama, semua suku, semua golongan diberikan keamanan oleh Rasulullah Saw di Madinah. Bahkan, pada saat *Futuh Makkah*, beliau menghapus *blacklist* Hindun Binti Utbah sebagai musuh karena telah memotong-motong tubuh pamannya, Hamzah.

Saat Hindun datang untuk meminta maaf atas kesalahannya yang telah lalu, beliau Saw tersenyum seraya berujar, “Tentu saja (aku maafkan), (kini) engkau bebas.”¹¹

11. Baca Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, Risalah Gusti, 2003. Hlm 354.

KETIGA, PRINSIP NASIONALISME¹²

Nasionalisme ialah paham cinta tanah air dengan wujud bela negara. Dan, Rasulullah pun mempraktikkannya dengan membela kota Madinah dari ancaman kaum Paganis Mekkah dengan beberapa kali peperangan.

Rasulullah sangat mencintai Kota Madinah sebagai tanah airnya, yang patut dibela sehingga di dalam Islam terkenal sebuah pepatah: **“*hubbul wathan minal iman*”** – cinta tanah air ialah sebagian daripada iman.

12. Tema tentang kecintaan Rasulullah Saw terhadap tempat tinggalnya di Madinah bisa dibaca Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, Risalah Gusti, 2003. Hlm 181-370. Untuk bahan perbandingan bias juga dibaca juga Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta, 2014. Hlm 139-152.

Karena kencintaannya itu, Rasulullah juga mewajibkan warganya membela kota Madinah apabila diserang oleh musuh dengan cara musyawarah. Muslim ataupun bukan sama-sama diwajibkan membela karena walaupun beragam, baginya, semua warga itu sama, yakni satu bangsa.

Itulah bukti nasionalisme Rasulullah pada kota Madinah. Tempat yang dicintainya, tempat yang dibelanya, dan tempat perlindungannya. Rasulullah setia mencintai kota Madinah sampai akhir hayatnya, sehingga Masjid Nabawi di Madinah, menjadi tempat suci yang ramai dikunjungi.



ABU BAKAR
ASH—SHIDDIQ
DALAM BERNEGARA

*Pemindahan kekuasaan,
dan Praktik Kenegaraan
Setelah Rasulullah Saw Tiada.*

Setelah Rasulullah Saw tiada, kepemimpinan umat dan negara dilanjutkan oleh empat sahabatnya. Mereka itu dinamai *Khulafa' Rasyidin*.¹³

Sahabat Nabi Muhammad Saw yang pertama kali melanjutkan kekuasaan itu adalah Abu Bakar As-Shiddiq.¹⁴ Ia sahabat terdekat Rasulullah Saw. Orang yang masuk Islam pertama dari kalangan dewasa.

13. Baca Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta, 2014. Hlm. 154-232.

14. Pembahasan tentang kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq ini, dapat dibaca dari karya Ahmad Abdul 'Al Al-Thahthawi, *150 Kisah Abu Bakar Al-Shiddiq*, Mizania, Bandung, 2016. Hlm 131-153.

AKHLAKNYA LUHUR, BUDI
PEKERTINYA MULIA, DAN
KEJUJURAN MELUMURI JIWANYA.
JULUKAN ASH—SHIDDIQ YANG
MELEKAT PADA NAMANYA, BERARTI
ORANG YANG MEMBENARKAN,
KARENA DIA MEMBENARKAN ISRA
DAN MIKRAJNYA MUHAMMAD
SAW. SELAIN ITU, JULUKAN INI
DIBERIKAN RASULULLAH SAW,
KARENA ABU BAKAR IALAH ORANG
YANG JUJUR DALAM KEBENARAN.

Ia menjadi pemimpin umat, dan pemimpin negara setelah wafatnya Rasulullah Saw. Terpilihnya Abu Bakar melalui diskusi panjang antara pemimpin dari Muhajirin dengan Anshar. Bahkan, untuk diskusi itu diperlukan musyawarah besar.

Sistem musyawarah itu dilakukan dengan cara-cara modern, yang berlangsung sangat terbuka dan demokratis. akhirnya, melalui musyawarah yang melibatkan dua golongan besar itulah, Abu Bakar terpilih sebagai Khalifah karena dia merupakan sahabat Rasul yang memiliki kualitas yang komplit: kaya, bertakwa, dan peduli pada rakyat miskin.

Mereka (Muhajirin dan Anshar)
memilih Abu Bakar bukan
berdasarkan keturunan semata,
juga bukan karena beliau sahabat
senior. Tapi, Abu bakar dipilih karena
kemampuan yang memadai untuk
memimpin umat Islam yang baru
ditinggal wafat oleh Rasulullah Saw.



Ketika ia terpilih, dan berpidato dalam sambutan di depan warga Madinah, berapi-api membakar kesadaran rakyatnya, sebagai berikut:

Saya telah terpilih menjadi pemimpin kamu sekalian, meskipun saya bukan orang yang terbaik di antara kalian.

*Karena itu,
bantulah saya
seandainya saya berada di jalan yang
benar, dan bimbinglah saya
seandainya saya berbuat salah.*

*Kebenaran adalah kepercayaan
dan kebohongan adalah pengkhianatan.
Orang yang lemah di antara kalian menjadi
kuat dalam pandangan saya,*

hingga saya menjamin hak-haknya
seandainya Allah menghendaki,
dan orang yang kuat di antara kalian
adalah lemah
dalam pandangan saya
hingga saya dapat merebut hak dari
padanya.

Taatilah saya!
selama saya taat kepada Allah
dan Rasul-Nya,
dan bila saya mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya,
janganlah ikuti saya ! ".

ITULAH ORASI PERTAMA YANG
DISAMPAIKAN ABU BAKAR KEPADA
RAKYATNYA. SETIDAKNYA, ORASI INI
MENGANDUNG BEBERAPA NILAI. DI
ANTARANYA MENJUNJUNG TINGGI
KEBENARAN, MENAATI PEMIMPIN YANG
ADIL DAN KEWAJIBAN SETIA KEPADA
NEGARA MERUPAKAN MANIFESTASI
KEIMANAN SEORANG MUSLIM.

LALU BAGAIMANA ABU BAKAR DALAM
MENJALANKAN KEKUASAAN SEBAGAI
KHALIFAH UMAT ISLAM?

PERTAMA, ABU BAKAR MEMBUAT LEMBAGA LEGISLATIF

Untuk mengambil keputusan, Abu Bakar meneruskan sistem musyawarah yang dicontohkan Rasulullah Saw.

Namun sistem musyawarah pada masa Abu Bakar memiliki sedikit perbedaan dengan masa Rasulullah Saw. Abu Bakar menerapkan kembali lembaga tradisi masyarakat Arab masa lalu, yaitu lembaga kesukuan.

Abu Bakar merekrut tokoh dari setiap suku sebagai anggota *Majelis Syura*. Abu Bakar bermusyawarah dengan mereka dalam mengambil keputusan agar keputusannya mengakomodasi kepentingan semua kelompok.

Ini artinya, Islam memberikan kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi dalam bernegara. Selama tujuannya untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri.

KEDUA, ABU BAKAR MEMBUAT LEMBAGA EKSEKUTIF

Dalam mengerjakan tugas pemerintahan, Abu Bakar membuat lembaga pelaksana kebijakan atau dikenal dalam sistem negara modern sebagai lembaga eksekutif.

Tugas-tugas pemerintahan dilimpahkan kepada sahabat lainnya. Di Madinah, misalnya, ia mengangkat Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan, juga Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai Bendahara.

Selain jabatan sekretaris dan bendahara, Abu Bakar menunjuk sahabat-sahabat lainnya untuk menjalankan roda pemerintahan.



KETIGA, ABU BAKAR MENDIRIKAN LEMBAGA YUDIKATIF

Yakni mendirikan lembaga peradilan. Hakim Agung yang ditunjuk olehnya adalah Umar Ibn Khattab. Ia bertugas memutuskan masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

Itulah sekilas gambaran bernegara ala Abu Bakar, sebagai bukti terhubungnya antara ketaatan kepada Allah dengan kesetiaannya kepada negara.



UMAR BIN KHATTAB

Negarawan Tegas tidak Beringas

Umar bin Khattab, khalifah umat Islam pasca wafatnya khalifah Abu Bakar. Ia memiliki julukan *al-Faruq*, artinya pembeda. Julukan ini mencerminkan ketegasan dan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran.¹⁵

Pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah hampir tidak menimbulkan perbedaan dan perdebatan yang alot. Karena karakter seperti Umar bin Khattab yang dibutuhkan pada saat itu. Lagi-lagi Umar dipilih bukan karena keturunan, atau senioritasnya. Akan tetapi karena kemampuannya. Ia ialah sosok yang tegas tapi tidak beringas. Berani tapi memiliki kelembutan hati.

15. Baca Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta, 2014. Hlm. 154-232.



Umar bin Khatab diangkat menjadi pemimpin melalui sistem parlementer. Yakni, sebelum Abu Bakar wafat, Ia menunjuk Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Asid bin Hudhair Al-Anshary, Said bin Zaid serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar.¹⁶

Mereka ditugaskan untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya. Dan terpilihah Umar bin Khattab.

16. Pembahasan tentang kepemimpinan Umar bin Khatab ini, dapat dibaca dari karya Ahmad Abdul 'Al-Thahthawi, *150 Kisah Umar Ibn Al-Khaththab*, Mizania, Bandung, 2016.

Dalam bernegara, banyak kebijakan Umar yang dinilai sangat brilian. Madinah mengalami masa kejayaannya pada masa khalifah kedua ini. Umar meneruskan sistem *syura* yang Abu Bakar terapkan, dan Ia menyempurnakannya.

Umar bin Khattab menerapkan sistem otonomi. Atau membuat tingkatan pemerintahan. Jika digambarkan, seperti adanya provinsi dan kabupaten atau kota. Sistem otonomi yang diterapkan ini membuat kebebasan kepada setiap gubernur atau amir. Mereka dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan daerahnya.

Inilah gaya Umar dalam bernegara. Ia tegas tapi tidak kaku. Kepemimpinannya penuh dengan toleransi, bahkan empati. Ia bersikap lemah lembut terhadap kaum *mustadhafin*, sekali pun berbeda agama.

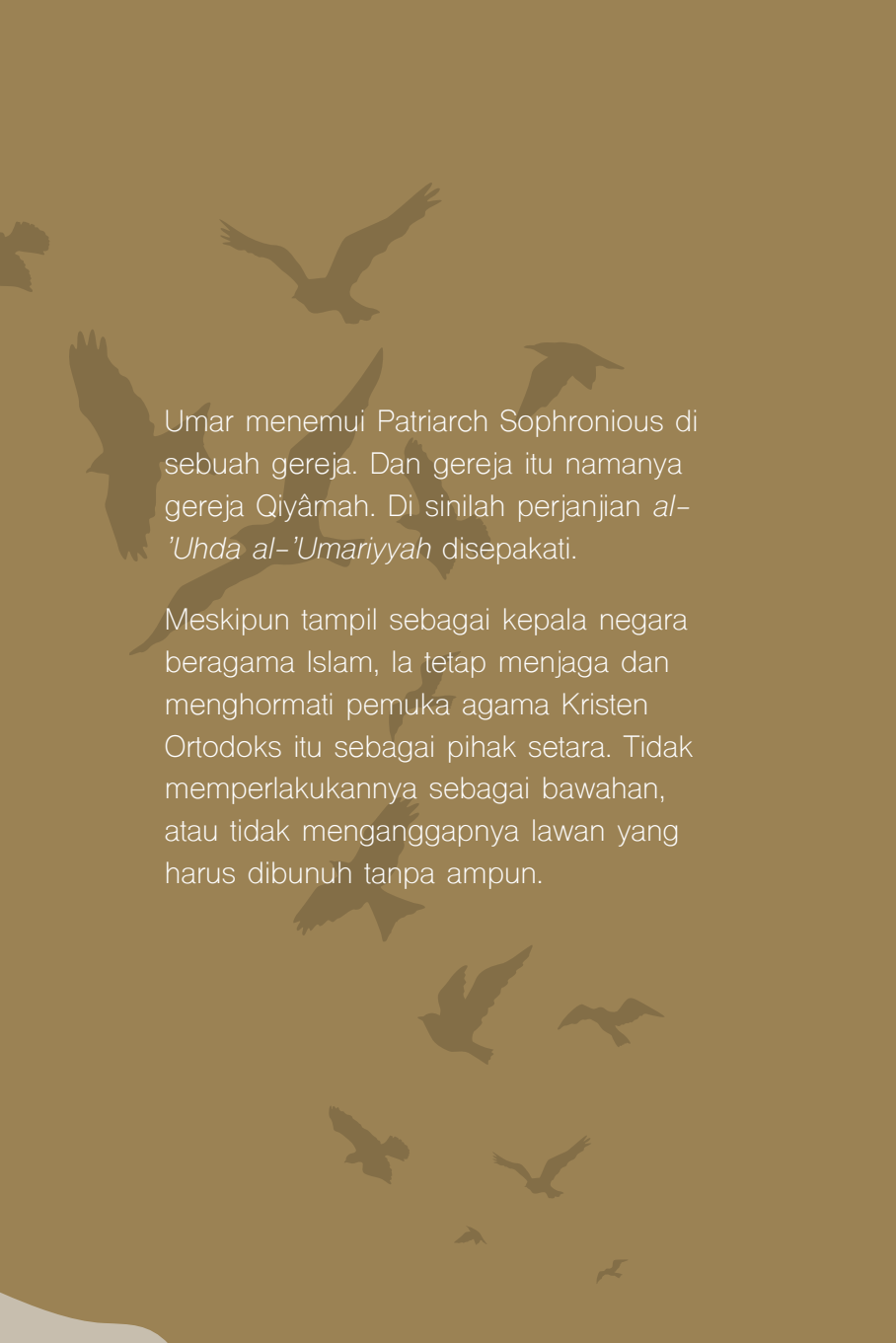
Baginya, keadilan harus dirasakan semua orang, walaupun terhadap pemeluk agama lain. Hal ini tergambar pada kisah pertemuan Umar bin Khattab dengan seorang pemuka agama Kristen di Yerusalem Palestina.

Kisah ini berawal dari sukarelanya Patriarch Sophronious, pemuka agama Kristen Ortodoks Yerusalem, yang memberikan kunci kota kepada Khalifah Umar bin Khattab.

Kunci tersebut diserahkan oleh Patriarch Sophronious kepada Umar tanpa paksaan, apalagi kekerasan.

Umar bin Khattab dengan Patriarch melakukan dialog dan negosiasi yang santun, untuk mewujudkan perdamaian antara umat Islam dan umat Kristen di Yerusalem.

Umar dan Patriarch bermusyawarah dan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan itu dinamakan Deklarasi ***al-'Uhda al-'Umariyyah*** atau jaminan keamanan atas warga Aelia. Nama Aelia merupakan pemberian kaum Kristen Ortodoks untuk wilayah Yerusalem saat itu.



Umar menemui Patriarch Sophronious di sebuah gereja. Dan gereja itu namanya gereja Qiyâmah. Di sinilah perjanjian *al-'Uhda al-'Umariyyah* disepakati.

Meskipun tampil sebagai kepala negara beragama Islam, Ia tetap menjaga dan menghormati pemuka agama Kristen Ortodoks itu sebagai pihak setara. Tidak memperlakukannya sebagai bawahan, atau tidak menganggapnya lawan yang harus dibunuh tanpa ampun.

Kisah tersebut tidak berhenti sampai di sana.


Setelah perjanjian tersebut disepakati, waktu shalat pun tiba. Lantas Umar bertanya kepada Patriarch Sophronious, **di mana ia bisa menunaikan shalat?**

Lalu, Pendeta itu menyiapkan gerejanya bagi Umar untuk melaksanakan shalat.

Namun, dengan sangat baik Umar menolak tawaran tersebut. Dan, ia kemudian keluar dari gereja *Qiyâmah*, kemudian shalat di anak tangga.

Kemudian Umar menjelaskan alasan dia tidak mau shalat di dalam gereja. Sebab ia khawatir, pasukan Muslim menganggap bahwa gereja Qiyâmah boleh direbut dan diubah menjadi masjid.

Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari umat Kristen, mereka membuatkan masjid untuk umat muslim. Masjid itu dibangun tepat di titik anak tangga tempat Khalifah Umar shalat.



Setelah masjid itu berdiri, Umar memerintahkan agar azan tidak dikumandangkan di dalam masjid tersebut. Sebab, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas umat Kristen Ortodoks di gereja *Qiyâmah*, yang tak jauh darinya.

Mendengarnya, Patriarch Sophronious mengakui kebijaksanaan Umar, kelembutan hatinya. Bukan hanya toleran, tapi Umar juga berempati.

Patriarch pun menghapuskan prasangkanya. Semakin erat persahabatannya. Dan semakin ramah di antara keduanya.

Meskipun kala itu muslim sudah mayoritas di Yerusalem, Umar memerintahkan mereka untuk menghormati hak-hak setiap warga sipil yang mereka jumpai di sana.

Itulah bernegara ala Umar Al-faruq yang tegas tapi tidak beringas. Singa padang pasir pemberani, namun penuh empati.

USMAN BIN AFFAN DALAM BERNEGARA

*Pemindahan Kekuasaan,
dan Praktik Kenegaraan*

Usman bin Affan adalah khalifah setelah Umar bin Khattab. Ia terpilih sebagai khalifah dengan sistem musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh lembaga permusyawaratan. Yang menjadi ketua majelisnya adalah Abdurrahman bin Auf.¹⁷

Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan anggota majelis selama 3 hari. Musyawarah itu mencari kesepakatan tentang khalifah pengganti Umar. Lahirlah kesepakatan dari mejelis itu, yang memutuskan bahwa Usman bin Affan lah sosok yang pantas memegang tampuk kepemimpinan.

17. Baca Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta, 2014. Hlm. 154-232.

Majelis permusyawaratan menyepakati Usman sebagai khalifah berdasarkan beberapa pertimbangan. Selain pertimbangan kepintarannya dalam bernegara, ia dipilih karena akhlaknya yang dermawan.

Sikap dermawan dan belas-kasih kepada rakyat kecil diharapkan mampu mengubah kondisi masyarakat Islam lebih sejahtera.

Semasa memerintah, Usman membentuk tiga lembaga untuk menjalankan kekuasaan negara.

Ketiga lembaga tersebut memegang kekuasaan yang berbeda. Di lembaga eksekutif terdapat *wazir* atau menteri-menteri. Mereka bertugas membantu khalifah mengerjakan tugasnya.

Lembaga legislatif di masa Usman masih bernama Majelis *Syura*. Lembaga ini terdiri dari sekumpulan tokoh yang menjadi perwakilan bagi rakyat.

Usman bin Affan sangat terbuka dalam hal rekrutmen anggota Majelis *Syura*. Bukan hanya tokoh dari kalangan muslim, tokoh dari kalangan non muslim pun diperbolehkan untuk menjadi anggota Majelis *Syura*.

Itulah kelegislatifan modern yang ditampilkan Usman bin Affan di masa pemerintahannya. Ia memberikan hak dan ruang politik yang sama kepada semua golongan.

Adapun di bidang yudikatif, atau di bidang penegakan hukum, Usman membuat sistem hukum baru, yang bertujuan untuk memperkuat pondasi negara, mengingat permasalahan hukum yang semakin luas dan menghadapi keragaman budaya.

Agar lembaga yudikatif ini berjalan dengan baik, Usman bin Affan mengangkat hakim-hakim terbaik. Diantaranya:

1. Zaid bin Tsabit yang bertugas di Madinah.
2. Abu Ad-Darda bertugas di Damaskus.
3. Ka'ab bin Sur bertugas di Bashrah.
4. Syuraih di Kufah.
5. Ya'la bin Umayyah di Yaman.
6. Tsumamah di Sana'a.
7. Usman bin Qais bin Abil Ash di Mesir

Upaya itu dilakukan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, di tengah perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat. Sehingga **diperlukan para hakim yang mampu berijtihad, menggali, menemukan, dan menerapkan hukum yang adil bagi masyarakat.**

Dari kepemimpinan Usman tersebut, kita dapat mengetahui bahwa musyawarah dalam negara itu terbuka untuk semua golongan.

Kemudian, dari pemerintahan Usman juga kita dapat mengetahui, bahwa perubahan hukum itu sesuatu yang wajar, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.¹⁸

18. Pembahasan tentang kepemimpinan Utsman Ibn Affan ini, dapat dibaca dari karya Ahmad Abdul 'Al Al-Thahthawi, *150 Kisah Utsman Ibn Affan*, Mizania, Bandung, 2016. .



PEMILU ZAMAN
ALI BIN ABI THALIB

*Pemindahan Kekuasaan,
dan Praktik Kenegaraan*

Ali bin Abi Thalib, adalah khalifah yang meneruskan pemerintahan Usman bin Affan. Ia dipilih langsung oleh masyarakat secara terbuka.¹⁹

Dengan serentak masyarakat berbondong-bondong membaiat Ali sebagai Khalifah. Namun awalnya ia menolak, dan ia berkata kepada semua masyarakat yang membaiat dirinya:

“Aku ingin sidang pemilihan khalifah didasarkan atas kebenaran, tidak mengikuti emosi, tidak mengkuaitaskan individu tertentu dan tidak mencela umat lain”.

Meskipun massa sudah banyak, kepercayaan melimpah-ruah, ia tidak menerimanya begitu saja. Atas penolakan Ali tersebut, masyarakat Madinah tetap meminta agar Ali menerima baiatnya.

19. Baca Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta, 2014. Hlm. 154-232.

Kemudaian Ali berkata:

Kalau begitu baiat ini harus berlangsung di masjid, sebab tidak boleh berlangsung kecuali atas dasar kerelaan kaum muslimin.²⁰

Perkataan ini sungguh menggambarkan kerendahan hati seorang Ali. Ia meminta kerelaan dari masyarakat Madinah. Ia tidak menerima begitu saja.

Setelah Ali resmi menjadi khalifah, ada perbedaan dengan khalifah-khalifah sebelumnya, yakni dalam menjalankan kekuasaan negara.

20. Pembahasan tentang kepemimpinan Ali Ibn Abu Thalib ini, dapat dibaca dari karya Ahmad Abdul 'Al Al-Thahthawi, *150 Kisah Utsman Ibn Affan*, Mizania, Bandung, 2016. .

Pada khalifah–khalifah sebelumnya, kekuasaan negara itu dijalankan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan pada masa Ali semuanya dipegang oleh khalifah.

Sebagai khalifah, Ali mempunyai otoritas penuh untuk membuat dan mengeluarkan peraturan atau undang–undang.

Sistem pemerintahan pada masa Ali ini jika diamati seperti sistem presidensial. Yakni presiden dipilih langsung oleh rakyat secara terbuka, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif, yakni kewenangan membuat Undang-undang.



KERAJAAN ISLAM

*Pemindahan Kekuasaan, dan Praktik
Kenegaraan Setelah Rasulullah dan Para
Sahabat*

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menampilkan keragaman praktik kenegaraan, dari mulai zaman Rasulullah Saw sampai Khulafa al-Rasyidin. Kita bisa mengetahui beberapa perbedaan dan persamaan praktik bernegara.

- Rasulullah Saw menjabat sebagai kepala negara di Madinah. Ia membuat kesepakatan dengan agama dan kelompok lain, yang diabadikan dalam Piagam Madinah.

- *Abu Bakar diangkat sebagai khalifah melalui proses musyawarah kedua kelompok besar, yaitu Muhajirin dan Anshar.*

- Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah melalui sistem parlementer. Yakni, Abu Bakar sebelum wafat menunjuk Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Asid bin Hudhair Al-Anshary, Said bin Zaid serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka ditugaskan untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya. Dan terpilih lah Umar bin Khattab.

- Usman bin Affan diangkat menjadi khalifah tidak jauh berbeda dengan pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Umar sakit keras, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Dan terpilih lah Usman bin Affan.

- Ali bin Abi Thalib, ia diangkat sebagai khalifah dengan cara pemilihan umum. Semua masyarakat Madinah memilih Ali sebagai khalifah. Tidak melalui parlemen atau tim formatur. Semua warga membaiat Ali sebagai khalifah.

Lalu bagaimana dengan praktik kenegaraan setelah keempat sahabat ini?

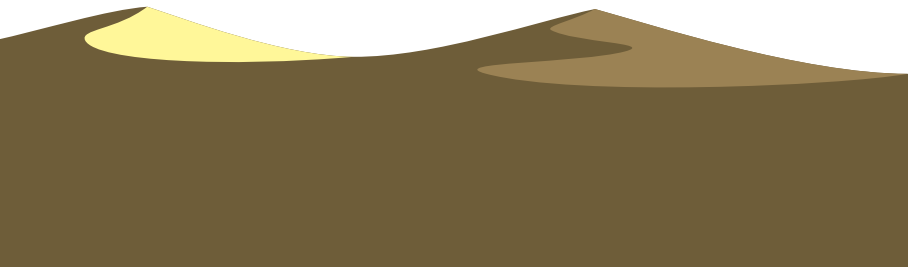
Setelah Khulafa al-Rasyidin ketatanegaraan Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga masa. Yaitu masa Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Turki Usmani. Meskipun sebelumnya terdapat dinasti-dinasti kecil.

DINASTI UMAYYAH

Dinasti Umayyah adalah pemegang kekuasaan setelah Ali RA, meskipun sebelumnya dipegang terlebih dahulu oleh Hasan RA putra Ali. Praktik kenegaraan dan sistem pemerintahan pada masa Dinasti Umayyah ini, sangat jauh berbeda dengan praktik kenegaraan zaman Rasulullah dan Sahabat.

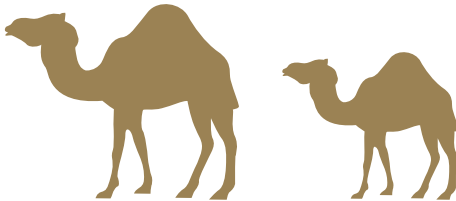
Dinasti Umayyah menerapkan sistem dinasti atau kerajaan. Sistem pemerintahannya monarki. Semua kekuasaan berada di tangan raja. Bentuk kerajaan ini tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar Arab.

Dinasti Umayyah ini dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekaligus ia sebagai raja pertamanya. Karena sistem monarki ini, perpindahan kekuasaan berdasarkan keturunan atau keluarga kerajaan.



Setelah Muawiyah wafat, kerajaan selanjutnya diteruskan oleh anaknya, dan seterusnya. Tidak ada kesempatan bagi orang di luar keturunan, atau di luar keluarga kerajaan untuk menjadi raja.

Dinasti Umayyah ini bertahan selama kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara yang semula di Madinah dipindahkan olehnya ke Damaskus Syiria. Selama 90 tahun ini kerajaan dipimpin oleh 14 raja.²¹




21. Baca Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta, 2014. Hlm.235-357.




DINASTI ABBASIYAH

Setelah 90 tahun kekuasaan dipegang oleh Dinasti Umayyah, selanjutnya kekuasaan dipegang oleh Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mampu menggulingkan Dinasti yang sudah 90 tahun berdiri.

Praktik kenegaraan pada masa Dinasti Abbasiyah ini tidak sama dengan Dinasti Umayyah. Sistem monarki yang diterapkan. Hanya putra mahkota yang berhak menjadi raja.





Dinasti Abbasiyah ini dicetuskan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ia juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Setelah ia wafat, kerajaan dilanjutkan oleh keturunannya, atau keluarga kerajaan. Itulah khas monarki.

Kerajaan ini bertahan lebih lama daripada Dinasti Umayyah. Kerajaan Abbasiyah ini bertahan selama 524 Tahun. Ibu kota yang semula di Damaskus, dipindahkan ke Baghdad Irak. Selama 524 tahun, dinasti ini dipimpin oleh 37 khalifah.²²

22. Baca Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta, 2014. Hlm.358-625.

TURKI UTSMANI

Dinasti terakhir yang dibahas dalam buku ini adalah dinasti Turki Usmani. Dinasti ini yang dibahas, karena termasuk kerajaan besar yang memegang tampuk kekuasaan setelah Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.

Wilayah Kerajaan Turki Usmani terbilang luas. Jumlah warga yang berada di wilayah tersebut banyak pula. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Penduduk kerajaan Turki Usmani ini sangat beragam. Masyarakat kerajaan Turki Usmani merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium dan Arab.

Masyarakat yang beragam ini dipimpin oleh seorang raja. Sebutan untuk seorang raja pada masa Turki Usmani ini adalah Sultan.



Praktik kenegaraan pada masa ini pun tidak jauh berbeda dengan dinasti sebelumnya. Kerajaan Turki Usmani menerapkan sistem kesultanan atau sama dengan monarki. Sultan harus dari keturunan atau keluarga sultan.

Kerajaan ini lahir pada tahun 1299 Masehi. Pendiri sekaligus raja pertama dari Turki Usmani ini adalah Usman I. Sultan setelah Usman I diturunkan kepada keturunan kerajaan atau keluarga kerajaan.

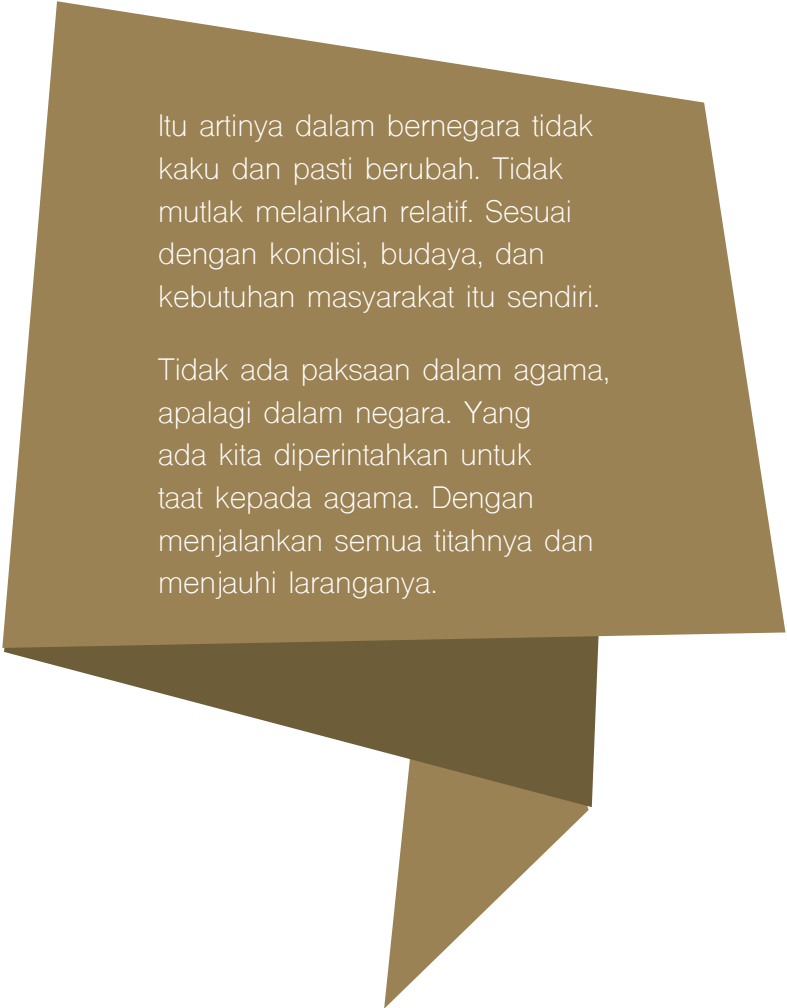
Sultan yang memegang kerajaan Turki Usmani ini sebanyak 37 Sultan. Kerajaan Turki Usmani ini mampu bertahan sekitar 625 tahun. Karena pada 1924 berdiri Republik Turki.²³

23. Baca Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta, 2014. Hlm.905-970.

Itulah sistem kerajaan atau monarki yang pernah diterapkan dalam praktik kenegaraan dalam sejarah Islam. Hal ini tidak jauh berbeda seperti kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia.

Sistem kerajaan atau monarki, saat ini masih diterapkan di beberapa negara. Di antaranya Inggris, Belanda, Denmark, Thailand, Jepang, Kamboja, Arab Saudi, Brunei Darusalam, dan negara lainnya.

Jadi kerajaan itu bukan satu-satunya sistem pemerintahan yang mutlak dalam Islam. Bahkan pada masa Rasulullah Saw dan Sahabat tidak diterapkan sistem kerajaan. Dalam Islam, itu semua hasil dari ijtihad.



Itu artinya dalam bernegara tidak kaku dan pasti berubah. Tidak mutlak melainkan relatif. Sesuai dengan kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Tidak ada paksaan dalam agama, apalagi dalam negara. Yang ada kita diperintahkan untuk taat kepada agama. Dengan menjalankan semua titahnya dan menjauhi larangannya.

Allah Swt berfirman:

JIKALAU SEKIRANYA PENDUDUK
NEGERI—NEGERI
BERIMAN DAN BERTAKWA,
PASTILAH KAMI AKAN
MELIMPAHKAN
KEPADA MEREKA BERKAH
DARI LANGIT DAN BUMI,
TETAPI MEREKA MENDUSTAKAN
(AYAT—AYAT KAMI) ITU, MAKA
KAMI SIKSA MEREKA DISEBABKAN
PERBUATANNYA.

QS. Al A'raaf ayat: 96



NEGARA ISLAM ZAMAN NOW

*Keragaman Sistem Pemerintahan
Negara Islam di Dunia*

Pada dua pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana keragaman praktik kenegaraan Islam. Dari mulai pemerintahan Rasulullah, keempat sahabat, dan ketiga Kerajaan Besar pasca sahabat.

Dalam pembahasan ini, penulis akan memotret beberapa negara Islam yang ada di dunia saat ini. Kita akan melihat sistem pemerintahan yang diterapkan di beberapa negara Islam yang ada di dunia ini.²⁴

24. Untuk menambah wawasan tentang Geo politik timur tengah dan Islam, alangkah baiknya bila menelaah karya Jhon L Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*, Mizan, Bandung, 1996.



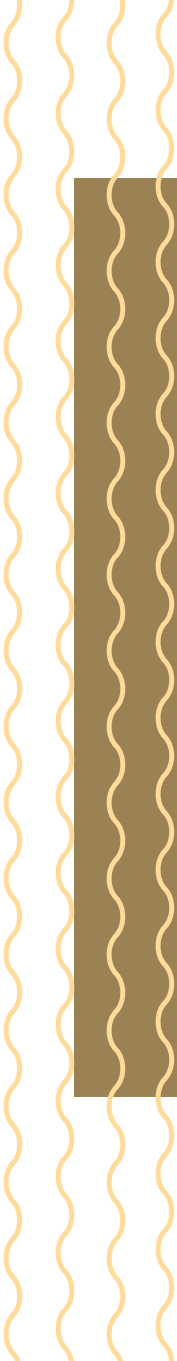
ARAB SAUDI

Negara yang dikenal di dunia dengan *Kingdom of Saudi Arabia*, atau Kerajaan Arab Saudi, merupakan negara terbesar kelima di Asia. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Sistem pemerintahan yang diterapkan di Arab Saudi adalah monarki. Artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh seseorang, yaitu raja. Kekuasaan diturunkan dengan cara pewarisan. Jadi hanya putra mahkota yang berhak menjadi raja, atau dari keluarga kerajaan.

Sistem hukum yang diterapkan di Arab Saudi adalah hukum Islam. Sumber hukum utamanya al-Qur'an dan al-Sunnah. Sumber hukum itu diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan.





Praktik peradilan semacam ini sama seperti dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Yakni hakim memutuskan perkara berdasarkan putusan sebelumnya, atau **yurisprudensi**.

Sistem hukum semacam ini diterapkan di Amerika, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Afrika Selatan. Hakim di negara-negara ini menjadikan ijihad atau penemuan hukum sebagai sumber hukum.

Adapun Lembaga Fatwa berwenang mengeluarkan fatwa menyangkut dengan kemaslahatan umum, baik menyangkut dengan masalah hak warga negara, maupun persoalan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Jabatan yang diberikan kepada orang yang memegang kekuasaan di lembaga ini adalah mufti. Jabatan ini termasuk jabatan tertinggi dalam penegakan hukum.

Adapun madzhab fiqh yang diresmikan di Arab Saudi saat ini adalah Madzhab Hambali. Fiqh yang dijadikan rujukan resmi oleh negara adalah Fiqh Hambali. Meliputi fiqh ibadah dan fiqh muamalah.



IRAN

Salah satu negara di Timur Tengah. Negara ini dahulunya terkenal dengan nama Persia. Iran terletak di Asia Barat Daya. Pada Tahun 1979 terjadi revolusi Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini. Sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran.

Penduduk di Republik ini, 98 % beragama Islam. Dan 2% memeluk agama lain. Seperti Kristen, Yahudi, Baha'i, Mandeian, Yezidi, Yarsani, dan Zoroaster.

Sistem pemerintahan yang diterapkan di Iran adalah Teokrasi. Yaitu sistem pemerintahan berdasarkan prinsip ketuhanan. Secara praktis, dasar negara Republik Islam Iran ini adalah Syariat Islam madzhab Syiah Imam 12 (Ja'fari).

Salah satu ajaran Syiah Imam 12¹² adalah konsep imamah. Yaitu Allah sebagai pemegang kedaulatan mutlak. Kemudian di dunia, kedaulatan itu dipegang oleh Nabi Muhammad Saw. Dan setelah wafatnya nabi Muhammad Saw, kekuasaan harus dilanjutkan oleh 12 Imam yang diwasiatkan Rasulullah Saw. Setelah 12 Imam ini wafat maka kekuasaan dilanjutkan oleh seorang Wali Faqih.

Faqih merupakan jabatan tertinggi. Seorang akan mendapatkan jabatan faqih apabila memenuhi kualifikasinya. Yakni ahli di bidang hukum Islam, adil, takwa, bijaksana, berani dan berwawasan politik.

Selain oleh seorang Faqih, pemerintahan juga dijalankan oleh presiden. Pemilihan presiden di Iran secara langsung dan terbuka, dipilih oleh rakyat.

Sistem hukum di Iran sangat dipengaruhi oleh jabatan Faqih. Pengaruhnya sangat besar, bukan hanya berkuasa menjalankan pemerintahan, Faqih juga berkuasa menjadi legislator, atau pembuat Undang-undang.

Mayoritas penduduknya muslim, bermadzhab Syiah. Dari keseluruhan jumlah muslim, sekitar 92% bermadzhab Syiah. Mereka beribadah dan bermuamalah sesuai tuntunan madzhabnya.

IRAK

Negara yang terletak di daerah Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Dahulu Negara ini dikenal dengan sebutan Mesopotamia.

Namun, kini namanya menjadi Republik Islam Irak.

Penduduk Republik Islam Iraq ini mayoritas Muslim. Yakni, 94% dari keseluruhan penduduknya. Adapun 6%-nya memeluk agama lain.

Sistem pemerintahan yang diterapkan negara Irak adalah Republik Federal Parlementer. Yaitu, Kepala Negara adalah seorang presiden yang dipilih secara tidak langsung.

Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Irak, dengan masa Jabatan 4 tahun (dapat dipilih kembali). Sedangkan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri.

PAKISTAN

Negara Islam yang terletak di Asia Selatan. Secara resmi negara ini bernama Republik Islam Pakistan. Negara ini merdeka pada tahun 1947 dari imperialisme Inggris. Pada tahun 1971 secara resmi Pakistan menjadi negara Republik Islam Pakistan.

Mayoritas Penduduknya Muslim. Yakni, sebanyak 96,4% dari keseluruhan jumlah penduduknya.

Pakistan merupakan negara federal dengan sistem parlemen. Di Pakistan, kepala negara adalah seorang presiden. Ia dipilih secara tidak langsung oleh Lembaga Pemilihan Presiden. Lembaga Pemilihan Presiden ini terdiri dari anggota senat, majelis nasional dan majelis provinsi.

Sedangkan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional Pakistan setiap 5 tahun sekali. Perdana menteri ini menjalankan kekuasaan eksekutif.



AFGHANISTAN

Adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan benua Asia. Secara resmi negara ini bernama Republik Islam Afghanistan. Negara ini merdeka dari Inggris pada 19 Agustus 1919.

Penduduk Afghanistan mayoritas Muslim. Persisnya, 99% dari keseluruhan penduduknya. Dan 1%-nya memeluk agama lain.

Sistem pemerintahan yang diterapkan di negara ini adalah Republik Presidensial Islam. Yaitu sistem pemerintahan yang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya adalah Presiden.

Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tidak melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

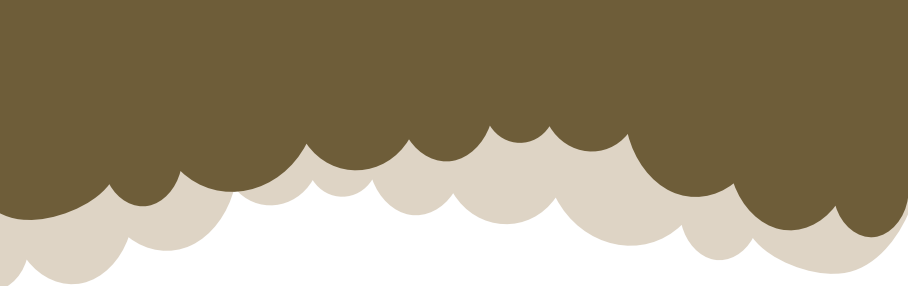


BRUNEI DARUSSALAM

Adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di bagian utara pulau Kalimantan, dekat dengan Indonesia. Secara resmi negara ini bernama Negara Brunei Darussalam.

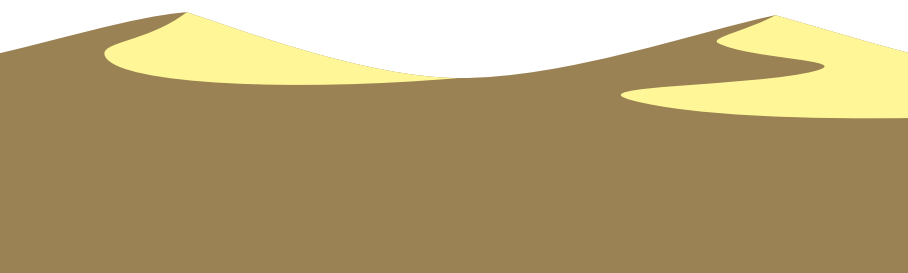
Penduduknya mayoritas beragama Islam. Yakni, sebanyak 78,8%. 8,7% beragama Kristen, 7,8% beragama Buddha, dan 4,7% agama lainnya.

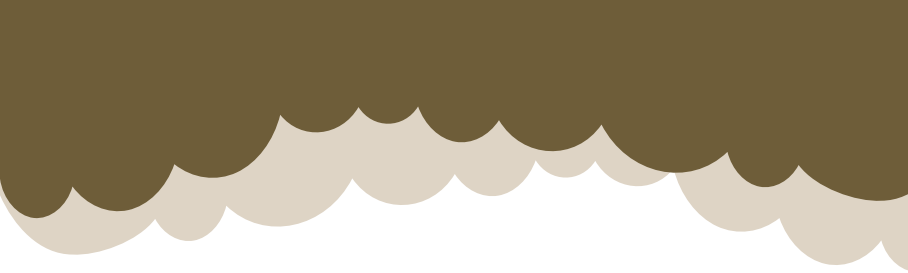
Sistem pemerintahan Negara Brunei Darussalam adalah monarki absolut. Yakni, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan negara berada ditangan seorang sultan.



Di negara ini, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya adalah seorang Sultan, yang merangkap sebagai Perdana Menteri.

Dengan monarki ini kekuasaan negara hanya diserahkan kepada putra mahkota, atau kepada keluarga sultan saja. Tidak ada pemilihan umum untuk pemilihan sultan.





Itulah beberapa negara Islam *zaman now*. Secara resmi negara-negara tersebut mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Namun penerapan sistemnya tidak seragam. Ada yang menggunakan sistem monarki, teokrasi, parlementer, dan presidensial.

Ini menandakan bahwa praktik bernegara itu sangat beragam. Tidak ada satu sistem pemerintahan pun yang sempurna. Semuanya diterapkan mengikuti kebutuhan warga negaranya. Tentu, demi kemaslahatan warga negara itu sendiri.





BERNEGARA GAK USAH KAKU, SELOW AJA!

*Praktik Ketatanegaraan dalam Islam
itu Relatif, Menyesuaikan dengan Waktu
dan Tempat*

Dalam Islam, bernegara *gak usah* kaku, *selow* aja. Ya betul, kita tidak perlu kaku dalam bernegara. Karena ketatanegaraan adalah sesuatu yang fleksibel. Pasti berubah sesuai kondisi. Tidak bisa dipaksakan, karena tergantung kebutuhan.

Terbukti dengan keragaman sistem pemerintahan yang diterapkan dari zaman Rasulullah Saw sampai saat ini. Dalam praktiknya ketatanegaraan Islam itu diterapkan dengan sistem yang berbeda-beda.

Ada yang menerapkan sistem *syura*, monarki, teokrasi, parlementer, presidensial. Semakin ke sini penerapannya semakin beragam. Bahkan suatu negara bisa mengadopsi sistem pemerintahan negara lain. Meskipun itu dilakukan oleh negara Islam terhadap negara lain.

Apakah itu salah?

Tentu tidak. Dalam Islam perubahan dan keragaman dalam praktik ketatanegaraan ini sesuatu yang normal. Karena beda negara pasti beda kebutuhan, beda budaya pasti beda masalah yang dihadapinya, dan masih banyak perbedaan lainnya.

Lantas, apakah perbedaan yang sangat banyak itu harus dimasukan ke dalam satu sistem saja ? Tentu tidak. Harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan akan kacau.

Islam sendiri mengklasifikasikan ketatanegaraan itu ke dalam ranah fiqih. Maka disebutlah ketatanegaraan itu sebagai fiqih siyasah.

Fiqih siyasah ini, berisi tentang aturan-aturan, atau hukum-hukum ketatanegaraan. Sifat dan hakikat dari fiqih itu sendiri adalah dinamis. Tidak statis dan kaku.

Fiqih pasti akan berubah, selama manusia itu berubah. Sehingga kebenaran fiqih itu relatif, tidak mutlak. Termasuk mengenai penerapan ketatanegaraan. Sistem negara bisa berubah sesuai kebutuhan dan kondisi negara itu sendiri.

Seperti Indonesia dengan Arab Saudi adalah dua negara yang berbeda. Warga negaranya berbeda, budayanya berbeda, dan kebutuhannya pun berbeda. Sehingga tidak mungkin Indonesia memaksakan harus sama sistem pemerintahannya dengan Arab Saudi secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, dalam kajian hukum Islam, yang namanya hukum, termasuk hukum ketatanegaraan, bisa berubah. Beginilah kaidahnya.



**"Hukum itu berubah
disebabkan perubahan
tempat dan waktu"**

Sistem ketatanegaraan pun akan berubah sesuai tempat dan waktu. Dari masa Abu Bakar As-Shiddiq sampai Usman, khalifah dipilih secara musyawarah. Pada masa Ali diterapkan sistem pemilu dalam memilih kepala negara. Setelah masa sahabat, kekuasaan itu diturunkan kepada keturunan kerajaan.

Mereka semua mempraktikkan ketatanegaraan Islam dengan gaya yang berbeda. Kenapa? karena dituntut oleh perubahan waktu dan tempat. Atau dipengaruhi oleh kondisi.

Sehinggga kita adalah INDONESIA, dengan sistem negara yang cocok dengan kondisi kita sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berideologikan Pancasila. Tak perlu kita memaksakan sistem pemerintahan lain di pemerintahan kita.

Kalaupun ada yang perlu disempurnakan, banyak cara-cara yang benar dan fasilitas hukum yang bisa digunakan untuk menyempurnakannya.



CINTA TANAH AIR CERMINAN IMAN

Nasionalisme dalam Islam



Tanah Air adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal. Tempat tinggal merupakan keperluan alamiah. Semua orang membutuhkan tempat tinggal, dengan kata lain semua orang membutuhkan tanah air.

Cinta tanah air adalah fitrah.

Bagaimana tidak?

Karena tanah air adalah ibu pertiwi. Di tanah air kita dilahirkan. Di tanah air kita pertama kali melihat kehidupan. Airnya, udaranya, dan alam sekitarnya sudah menyatu dengan diri.

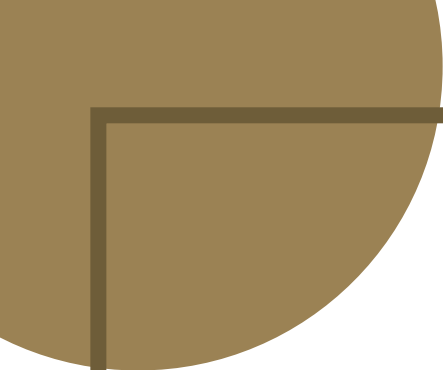


Bukan hanya kita, siapa pun di dunia ini memiliki fitrah yang sama. Yaitu mencintai tanah airnya. Ditampakkan atau tidak kecintaan itu, sesungguhnya ada dalam diri setiap manusia.

Begitu juga dengan Rasulullah Saw. Ia pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada tanah kelahirannya, Makkah.


DARI IBNU ABBAS RA IA BERKATA,
RASULULLAH SAW BERSABDA,
'ALANGKAH BAIKNYA ENGKAU,
MAKKAH,
SEBAGAI SEBUAH NEGERI,
DAN ENGKAU MERUPAKAN NEGERI
YANG PALING AKU CINTAI.
SEANDAINYA KAUMKU TIDAK
MENGUSIRKU DARI ENGKAU,
NISCAYA AKU TIDAK TINGGAL DI
NEGERI SELAINMU.

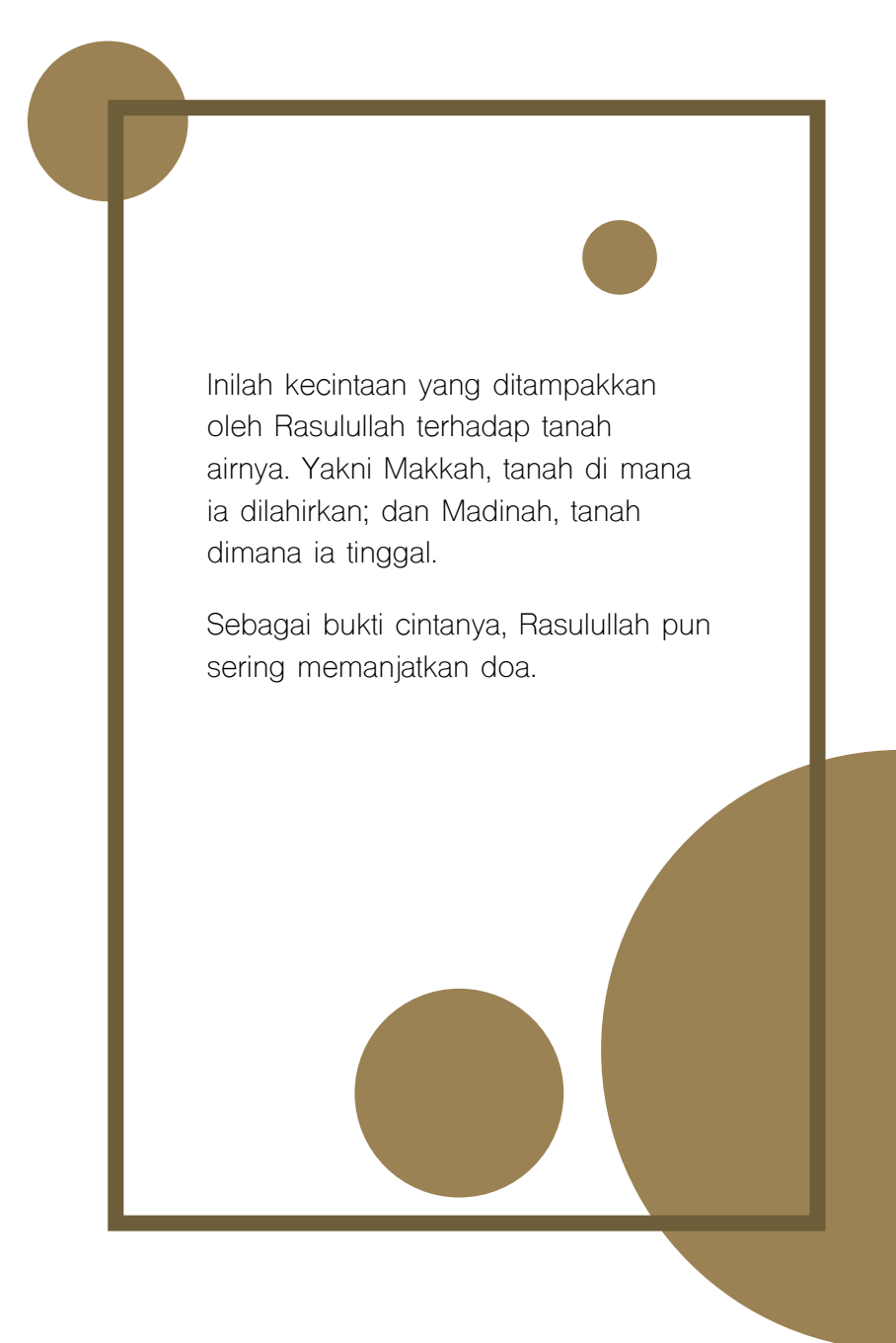
HR Ibnu Hibban



Sangat terlihat, Rasulullah tidak ingin memisahkan diri dari tanah airnya. Hanya kondisilah yang mengharuskan ia keluar sementara dari tanah kelahirannya. Setelah berhasil kembali, kecintaanya pun tidak berubah.

Selain tanah kelahirannya, Rasulullah Saw juga sangat mencintai tanah tempat tinggalnya. Yakni Madinah.



The image features a minimalist design with a white background. A thick brown rectangular frame is positioned on the left and bottom. In the top-left corner, there is a large brown circle. In the top-right area, there is a smaller brown circle. In the bottom-right area, there is a large brown circle. In the bottom-center area, there is a medium-sized brown circle. The text is centered within the frame.

Inilah kecintaan yang ditampakkan
oleh Rasulullah terhadap tanah
airnya. Yakni Makkah, tanah di mana
ia dilahirkan; dan Madinah, tanah
dimana ia tinggal.

Sebagai bukti cintanya, Rasulullah pun
sering memanjatkan doa.



YA ALLAH,
JADIKAN KAMI MENCINTAI
MADINAH
SEPERTI CINTA KAMI
KEPADA MAKKAH,
ATAU MELEBIHI CINTA KAMI
PADA MAKKAH."

HR al-Bukhari: 7/161

Lalu bagaimana dengan Negara Indoneisa?

Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat beberapa pandangan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia mengenai bentuk negara ini.

Muhammadiyah

Organisasi ini lahir pada tahun 1912, sekitar 33 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Muhammadiyah memiliki pandangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Menurut Muhammadiyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *Darul Ahdi wa Syahadah*.

DARUL AHDI ARTINYA NEGARA TEMPAT
KITA MELAKUKAN KESEPAKATAN
NASIONAL. INDONESIA BERDIRI KARENA
KERAGAMAN BANGSA, GOLONGAN,
DAERAH, KEKUATAN POLITIK, YANG
SEPAKAT UNTUK MENDIRIKAN
INDONESIA.

NEGERI INI MERDEKA BUKAN
DIPERJUANGKAN OLEH HANYA SATU
AGAMA SAJA. TAPI HASIL DARI
BERGANDENG—TANGAN, BAHU—
MEMBAHU, DAN PENGORBANAN
SELURUH MASYARAKAT INDONESIA DARI
SEMUA AGAMA YANG ADA.

DARUL SYAHADAH ARTINYA NEGARA
TEMPAT KITA MENGISI. SETELAH INDONESIA
MERDEKA, MAKA SELURUH ELEMEN BANGSA
HARUS MENGISI BANGSA INI MENJADI
NEGARA YANG MAJU, MAKMUR, ADIL
BERMARTABAT. JUGA BERGANDENGAN
TANGAN MENJAGA KESATUAN NEGARA DARI
SIAPAPUN YANG BERNIAT MERUSAKNYA.

BEGITU JUGA DENGAN PANCASILA.
MUHAMMADIYAH MEMILIKI PANDANGAN
BAHWA PANCASILA YANG MENJADI DASAR
NEGARA INI, SUDAH SESUAI DENGAN NILAI—
NILAI ISLAM.

Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU), organisasi yang lahir pada 1926, sekitar 14 tahun sebelum Indonesia merdeka. Organisasi Islam ini memiliki kontribusi yang besar bagi kemerdekaan Indonesia.

Mengenai NKRI, organisasi ini memiliki pandangan tersendiri. Menurut NU, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesepakatan bersama.

Semua kelompok masyarakat, baik yang Muslim maupun yang non-muslim, berjanji untuk saling menjaga, mencintai, dan menyayangi.

Karena Muslim dan non-muslim sama-sama berjuang demi merdekanya negara ini. Sehingga NU berpendapat bahwa negara ini tidak bisa diakuisisi oleh satu agama saja.


Untuk Indonesia yang sangat beragam, maka menurut NU, sudah tepat jika Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada penyelewengan dan tidak bertentangan dengan Islam.

Organisasi ini memiliki alasan dalam mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara.

Menurut NU, Islam bukan ideologi tapi agama. Karena ideologi adalah pemikiran manusia. Sehingga ideologi itu tidak harus agama.


Selain menurut kedua ormas besar ini, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang NKRI. Melalui fatwanya MUI mengatakan bahwa NKRI adalah sah secara agama.


Maka atas dasar pandangan-pandangan itulah, kita sebagai warga negara Indonesia, wajib mempertahankan NKRI. Harus menjaga NKRI dari siapa pun yang hendak menghancurkannya. Dengan apa? tentu dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, yang bisa kita lakukan. Mulai dari diri kita.



Dengan demikian, kecintaan kita kepada Indonesia pun bukan sekadar kewajiban, akan tetapi fitrah. Kita tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Karena Indonesia adalah kita. Dengan segala keragamannya. Sebesar apapun kekaguman kita kepada negara lain, tidak akan bisa mengalahkan cinta kita kepada negara sendiri.

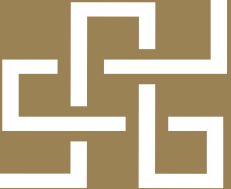
Terkadang kita kecewa dengan kondisi negeri ini, tapi yakin, itu semua tidak akan mengurangi kecintaan kita. Terkadang kita bangga ketika bisa menginjakkan kaki di negeri orang. Tapi kita akan bahagia ketika kita kembali ke negeri sendiri. Karena kebanggaan itu sementara, dan kebahagiaan itu selamanya.





Indonesia adalah pemberian Allah Swt. Kita harus bersyukur atas keragaman dan kekayaan Indonesia. Sebagai bukti rasa syukur ini adalah dengan merawat dan menjaganya. Tentu, kita tidak akan mampu menjaga negara ini dengan baik tanpa adanya cinta.

Para ulama, kiai, ustaz dan tokoh agama lainnya berjuang mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia. Mengapa mereka *segitunya*? Karena mereka cinta tanah airnya, Indonesia.



Maka tidak berlebihan jika ada seorang ulama yang mengatakan, cinta tanah air itu bagian dari iman. Ini sangat logis. Karena dengan cinta tanah air, kita akan menjaganya baik-baik demi kemaslahatan orang banyak.

Keimanan bukan hanya dalam dada, tapi ditampilkan dalam perilaku. Oleh sebab itu perilaku kita menjaga negara ini, dan cinta pada tanah air merupakan cerminan iman.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad Abdul 'Al Al-Thahthawi, *150 Kisah Abu Bakar Al-Shiddiq*, Mizania, Bandung: 2016.
- , *150 Kisah Umar Ibn Al-Khatthab*, Mizania, Bandung: 2016.
- , *150 Kisah Utsman Ibn Affan*, Mizania, Bandung: 2016.
- , *150 Kisah Utsman Ibn Affan*, Mizania, Bandung: 2016.
- Aidh Al-Qarni, *The Story of Message*, Maghfirah Pustaka, Jakarta: 2008.
- Amin Suma, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, Bandung: Mizan, 2016.
- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif: Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

- Jhon L Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, Mizan, Bandung: 1996.
- Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, Risalah Gusti, 2003.
- Komarudin Hidayat (ed.), *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila*, Bandung: Mizan, 2014.
- Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, Mizan, Bandung: 1994.
- Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Tintamas, Jakarta: 2016.
- Muhammad Majdi Marjan, *Muhammad Nabi Cinta*, Pustaka IMan, Depok: 2006.
- Nasaruddin Umar, *Tasawuf Modern: Jalan Mengenal dan Mendekatkan Diri pada Allah*, Republika, Jakarta: 2015.
- Nurcholish Madjid, *32 Khutbah Jumat Cak Nur*, Jakarta: Noura Books, 2016.
- Philip K Hitti, *History of Arabs*, Serambi, Jakarta: 2014.
- Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfuri, *Ketika Bulan Terbelah: Jejak Biografi Nabi Muhammad*, Alita Aksara Media, Jakarta: 2012.

TENTANG PENULIS



Azhar Muhamad Akbar, lebih akrab dipanggil Azhar, adalah penulis yang Lahir di Bandung 9 Agustus 1993. Masa remaja penulis menempa ilmu di pesantren Darul Arqam Garut selama 6 tahun, di sana ia belajar bersama kawannya dari berbagai daerah, dan latar belakang yang berbeda. Lalu melanjutkan pendidikan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sejak 2012, penulis sudah aktif menulis baik dalam bentuk buku, artikel, maupun tulisan di sosial media. Penulis telah melahirkan beberapa buku diantaranya: *Kekuasaan Pengadilan Agama* terbit tahun 2016, *learning arabic for quranic understanding*, terbit tahun 2017, dll.

Selain menulis, penulis adalah pendukung Gerakan Islam Cinta (GIC) yang tergabung dalam komunitas Gen IC, juga berkiprah di bidang pendidikan perdamaian, dengan bergabung menjadi fasilitator peace generation, dan Young Interfaith Peace Maker Indonesia.

Bila profil ini masih ada yang belum jelas, bisa berbincang langsung dengan penulis. bisa follow akun medsosnya di-

@azharmuhamadakbar, atau melalui email: azharmuhamadakbar@gmail.com.



KETAATAN DAN KESETIAAN

Ketaatan dan kesetiaan merupakan dua kata yang berbeda saat diucapkan, namun memiliki kesamaan makna substansial. Dua-duanya (ketaatan dan kesetiaan) mencerminkan cinta yang disertai pengabdian.

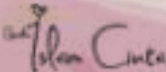
Cerminan cinta yang disertai pengabdian itu perilakunya mirip sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Sang pencinta akan selalu menundukkan ego untuk menuruti apa yang diminta kekasihnya dengan ketaatan dan kesetiaan yang *fuel injection* (kok, mirip motor kekinian ya, hehehe).

Tak heran, bila disuruh berlari mengelilingi Monas, energinya akan keluar super *gede*, sehingga lelah pun tak dirasa, berat terasa ringan, kunang-kunang menjadi terang, dan kaki pun seolah mewakili kaki Lionel Messi: Lincih bingitss!

Kenapa, kok, bisa seperti itu?

“Sebagai umat beragama dan warga negara yang baik kita harus terus berupaya menumbuhkan kedewasaan dan kematangan beragama, berbangsa dan bernegara. Buku ini membantu kita mewujudkan hal tersebut.”

-Eddy Najmuddin Aqdhijaya
Ketua Gerakan Islam Cinta



PPIM
LAIN JAKARTA



#AyoSebarkanCinta #MeyakiniMenghargai

ISLAM POPULER

ISBN: 978-602-53014-5-2



9 786025 301452